

LAPORAN PENELITIAN

DANA OPF 1996/1997

KONTRAK NO : 61/OPF-UNAND/11/8-1996

**EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN KORUPSI
DI INDONESIA**

*(Tinjauan Atas Pelaksanaan Undang - Undang
No.3 Th.1971)*

OLEH : 1. MARDENIS, SH. MS (KETUA PELAKSANA)
2. EVIYARDI, SH. MH (ANGGOTA)
3. NAJMI, SH. MH (ANGGOTA)
4. M. JHON, SH (ANGGOTA)
5. NARZIF, SHLMH (PEMBIMBING)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1996

ABSATRAK

Sebenarnya permasalahan korupsi di Indonesia telah ada sejak lama, yakni sejak zaman Orde lama. Namun seiring dengan kemajuan dalam bidang ekonomi yang dicapai selama Orde Baru, ternyata korupsi juga telah berkembang dalam skala yang sangat besar, yang menurut dua penerbitan terkemuka di Eropah (Inggris dan Jerman); Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan angka korupsi terbesar nomor tiga di Asia setelah China dan Hongkong.

Tulisan ini bertujuan untuk mencoba memahami permasalahan korupsi di Indonesia terutama sekitar kendala-kendala struktural dan kultural yang menyebabkan upaya-upaya pemberantasannya sampai saat ini tidak pernah membawa hasil yang mengembirakan.

Penelitian ini akan mencoba memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah karakteristik kejahatan korupsi di Indonesia, khususnya era Orde Baru sekarang ? 2) mengapa korupsi di Indonesia cenderung semakin meningkat ? 3) Kendala-kendala struktural dan kultural apakah yang menyebabkan penanggulangannya selama ini kurang berhasil ?

Hasil studi penulis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif perkembangan korupsi di Indonesia terjadi penurunan dibanding periode-periode sebelumnya, tetapi secara kualitatif (jumlah dana yang diselewengkan) telah terjadi peningkatan dalam jumlah yang sangat besar. Peningkatan tersebut terjadi, terutama disebabkan oleh karena sangat dominannya peran birokrasi serta sangat marginalnya peran lembaga-lembaga nonbirokrasi dalam sistem politik Indonesia kontemporer.

Padang. Desember 1996.

ABSATRAK

Sebenarnya permasalahan korupsi di Indonesia telah ada sejak lama, yakni sejak zaman Orde lama. Namun seiring dengan kemajuan dalam bidang ekonomi yang dicapai selama Orde Baru, ternyata korupsi juga telah berkembang dalam skala yang sangat besar, yang menurut dua penerbitan terkemuka di Eropah (Inggris dan Jerman); Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan angka korupsi terbesar nomor tiga di Asia setelah China dan Hongkong.

Tulisan ini bertujuan untuk mencoba memahami permasalahan korupsi di Indonesia terutama sekitar kendala-kendala struktural dan kultural yang menyebabkan upaya-upaya pemberantasannya sampai saat ini tidak pernah membawa hasil yang mengembirakan.

Penelitian ini akan mencoba memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah karakteristik kejahatan korupsi di Indonesia, khususnya era Orde Baru sekarang ? 2) mengapa korupsi di Indonesia cenderung semakin meningkat ? 3) Kendala-kendala struktural dan kultural apakah yang menyebabkan penanggulangannya selama ini kurang berhasil ?

Hasil studi penulis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif perkembangan korupsi di Indonesia terjadi penurunan dibanding periode-periode sebelumnya, tetapi secara kualitatif (jumlah dana yang diselewengkan) telah terjadi peningkatan dalam jumlah yang sangat besar. Peningkatan tersebut terjadi, terutama disebabkan oleh karena sangat dominannya peran birokrasi serta sangat marginalnya peran lembaga-lembaga nonbirokrasi dalam sistem politik Indonesia kontemporer.

Padang. Desember 1996.

A. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, permasalahan korupsi di Indonesia "kembali" menjadi perhatian publik. Sengaja digunakan kata "kembali", karena permasalahan korupsi di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal baru, tetapi merupakan penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Selama Pemerintahan Orde Baru, seiring dengan kemajuan dalam pembangunan ekonomi yang dicapai, ternyata korupsi pun telah berkembang dalam kualitas dan kuantitas yang semakin meningkat secara tajam. Disamping itu, nampaknya upaya pemecahan dan penanggulangannya juga semakin sukar, ibarat mengurai benang kusut yang tidak jelas dari mana harus dimulai.

Gambaran tentang semakin meningkatnya perbuatan korupsi selama Orde Baru, misalnya terlihat jeas dari pernyataan ekonom senior Indonesia, Soemitro Djoyohadikusomo yang menyatakan bahwa angka kebocoran anggaran pembangunan Indonesia tahun 1993 mencapai angka 30% (Harian republik 9/1/1994). Dengan pernyataan Soemitro tersebut, dapatlah diduga bahwa hampir sepertiga jumlah anggaran atau lebih dari 20 trilyun rupiah uang negara pada tahun tersebut telah diselewengkan oleh oknum-oknum birokrat Indonesia baik melalui korupsi langsung maupun lewat kolusi dengan pihak pengusaha, permainan tender serta berbagai bentuk pemborosan dan in efisiensi lainnya.

Tidak lama setelah pernyataan Soemitro itu mulai dilupakan orang, rakyat Indonesia kembali dikejutkan dengan berita bobolnya dana Bank Pembangunan Indonesia (BAPPINDO)

mewakili hasil penelitian yang sebenarnya, walaupun kebenaran penelitian masih harus diuji atau dinilai oleh orang lain pada waktu dan situasi yang lain pula.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Perkembangan Korupsi di Indonesia*

Gejala korupsi di Indonesia sesungguhnya tidak saja merupakan permasalahan yang berkembang dan dihadapi oleh regim Orde Baru saja. Di zaman pemerintahan Orde Lampun masalah ini juga tetap menjadi sorotan, kendati-pun waktu itu jumlah dan yang dikorupsi belum sebesar yang terjadi sekarang ini.

Perkembangan korupsi di awal Orde Baru, antara lain ditandai dengan munculnya berbagai protes dalam bentuk demonstrasi dari kalangan mahasiswa militan dan pers. Mereka secara khusus mengajukan protes pada para pejabat militer. Pada akhir tahun 1967, sebagai salah satu usaha untuk menenangkan tuntutan publik yang bersikap kritis itu, pemerintah membentuk suatu badan bernama Team Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Kepres No. 223/1967. team ini diketuai oleh Jaksa Agung Sugih Arto. Pada tahun 1969, Team ini melaporkan bahwa selama tahun 1968 telah diusut 172 kasus korupsi, tetapi tak satupun

Sebenarnya kalau kita mau menurut, maka pasti akan lebih banyak lagi kendala-kendala struktural yang menyebabkan DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya terutama dibidang pengawasan terhadap sepak terjang eksekutif secara optimal yang dapat kita sebutkan. Namun untuk keperluan studi ini, penulis melihat beberapa hal yang disebutkan diatas merupakan kendala-kendala utamanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan krupsi di Indonesia setidaknya pada lima tahun terakhir ini secara kuantitas telah terjadi penurunan, tetapi secara kualitas (besar dana yang diselewengkan) telah terjadi peningkatan dalam jumlah yang sangat besar yang apabila tidak segera diarsikan solusi pemecahannya, maka perkembangan tersebut akan dapat menjadi ancaman paling potensial terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di masa datang.

Adanya peningkatan dalam jumlah yang sangat besar itu terjadi, disamping karena seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang begitu pesat dicapai selama Orde Baru, hal itu juga kerana semakin sangat dominannya peran birokrasi dan semakin marginal (lemah) nya peran lembaga politik non birokrasi dalam perkembangan sistem poliik Indonesia kontemporer. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan kehadiran Golkar dan ABRI sebagai

faksi mayoritas di DPR dimana peran mereka seringkali tumpang tindih dengan birokrasi, sehingga fungsi pengawasan (terutama secara eksternal) semakin sangat sukar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, sistem biokrasi Orde Baru yang cenderung patrimonial, dalam batas-batas tertentu, telah menjadikan sikap aparat birokrasi kita terlalu berorientasi kepada atasan mereka yang mengeskakan, sehingga telah menumpulkan budaya korektif, budaya salah/dosa, serta budaya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Selanjutnya, dilihat dari aspek normatif, sistem pembuktian yang berlaku dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang ini yang meletakkan beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum serta kepada terdakwa dirasakan tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan korupsi yang semakin kompleks, karena sistem tersebut terbukti sering menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum dalam upaya mengembalikan uang negara yang diselewengkan.

Skandal mega kredit Golden Key Groups yang belum lama ini terungkap dan melibatkan Eddy Tanzil serta beberapa pejabat tinggi negara, agaknya merupakan salah satu contoh yang cukup aktual mendukung kesimpulan kesimpulan-kesimpulan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Sudarso "Korupsi di Indonesia", Baharat, Jakarta.
- Hamzah, Andi. "Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya", Alumni Bandung, 1975.
- Jackson, "Political Power and Communications in Indonesia".
- Kuntjara Ningrat, "Rintangannya Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia". Baharat, Jakarta, 1969.
- Ongkokham, "Tradisi dan Korupsi", dalam PRISMA", No. II
- Singarimbun dan Masri Efendi, Sofyan, (editor), "Meode Penelitian Survei", LP3ES, Jakarta, 1987.
- Weber, "Economy and Society : An Outline of Interpretative Sociology, Vol. II, University of California-Press London, 1978.
- Harian : Kompas, 20 Juni 1991
- Bernas, 3 Februari 1994.
- Republika, 9 Januari 1993
- Republika. 17 Maret 1995
- Republika, 9 Januari 1994
- Republika, 10 April 1995
- Republika, 1 November 1994